

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

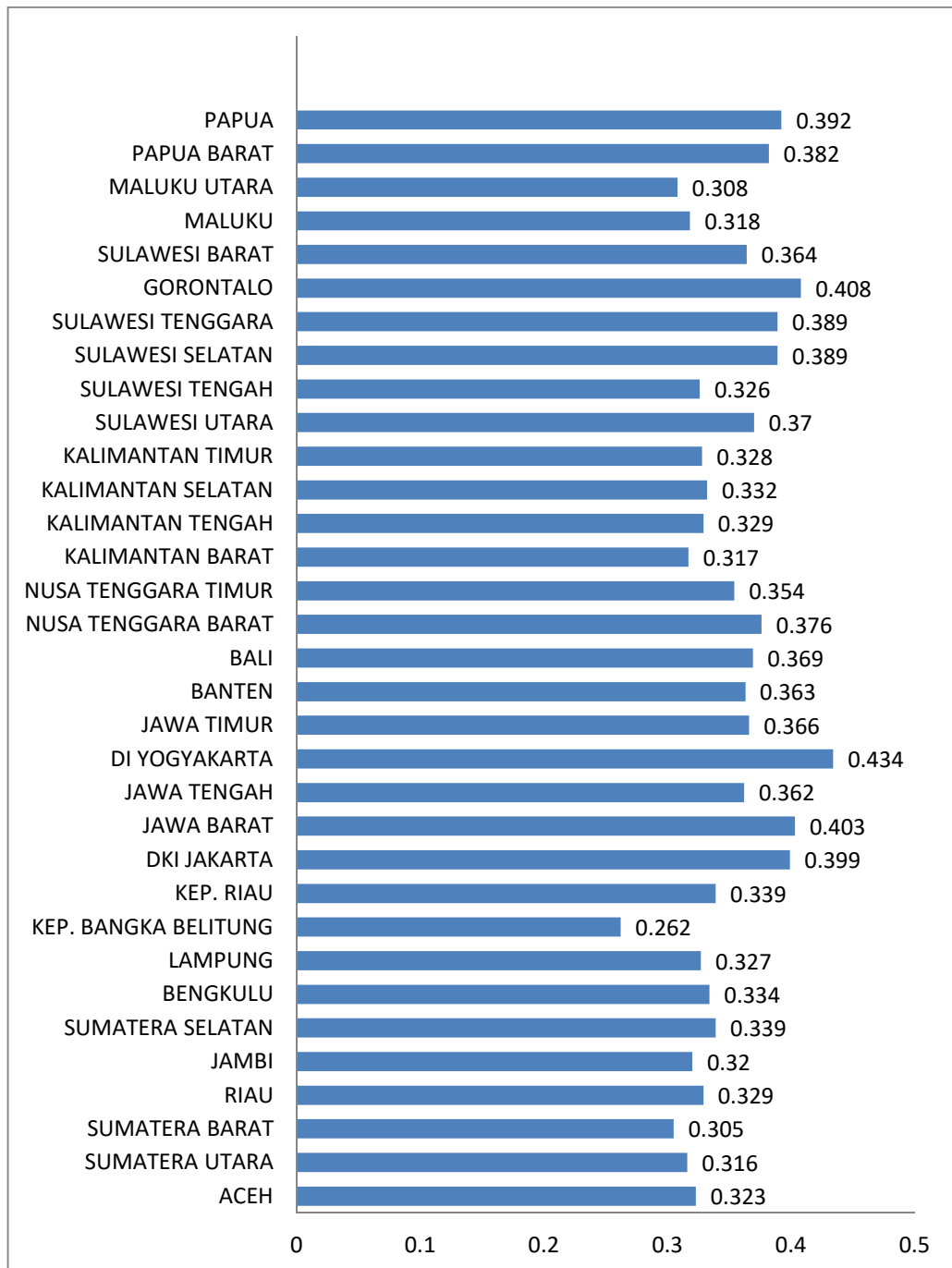
Secara umum, setiap negara pastinya mempunyai prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional yang bertujuan untuk percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan (Wijayanto, 2016). Menurut Sukirno dalam Fitriani (2018) mengatakan bahwa suatu pembangunan ekonomi dapat dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara berkembang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan kegiatan ekonomi. Namun, ketimpangan masih merupakan masalah mendasar yang menjadi perhatian.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Isu kesenjangan ekonomi antar negara maupun antar daerah dalam suatu negara saat ini sangat membutuhkan perhatian khusus, terlebih jika berdampak terhadap perekonomian global. Ketimpangan merupakan mesin yang dapat merusak pembangunan sumber daya manusia, proses akumulasi modal fisik dan bahkan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Shi, 2018).

Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, disebabkan karena dipengaruhi oleh berbagai aspek yang dirilis oleh *World Bank* tahun 2016. Ketimpangan tidak hanya dipengaruhi hanya satu faktor saja, tetapi

yang mempengaruhi terdapat dari banyak faktor dan umumnya faktor saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut bisa dari kondisi sumber daya alam, karakteristik geografis, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pada suatu wilayah.

Ketimpangan adalah isu global yang dirasakan oleh setiap negara baik negara maju ataupun negara berkembang. Umumnya derajat ketimpangan relatif lebih tinggi di negara berkembang dari pada di negara maju, dan ketimpangan tersebut cenderung terus berkurang dalam proses pembangunan ekonomi (Dorn & Fuest, 2017). Sama halnya dengan di Indonesia, ketimpangan regional masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Rasio Gini dan Indeks Williamson tahun 2020 tiap provinsi di Indonesia yang terdapat pada gambar berikut ini:



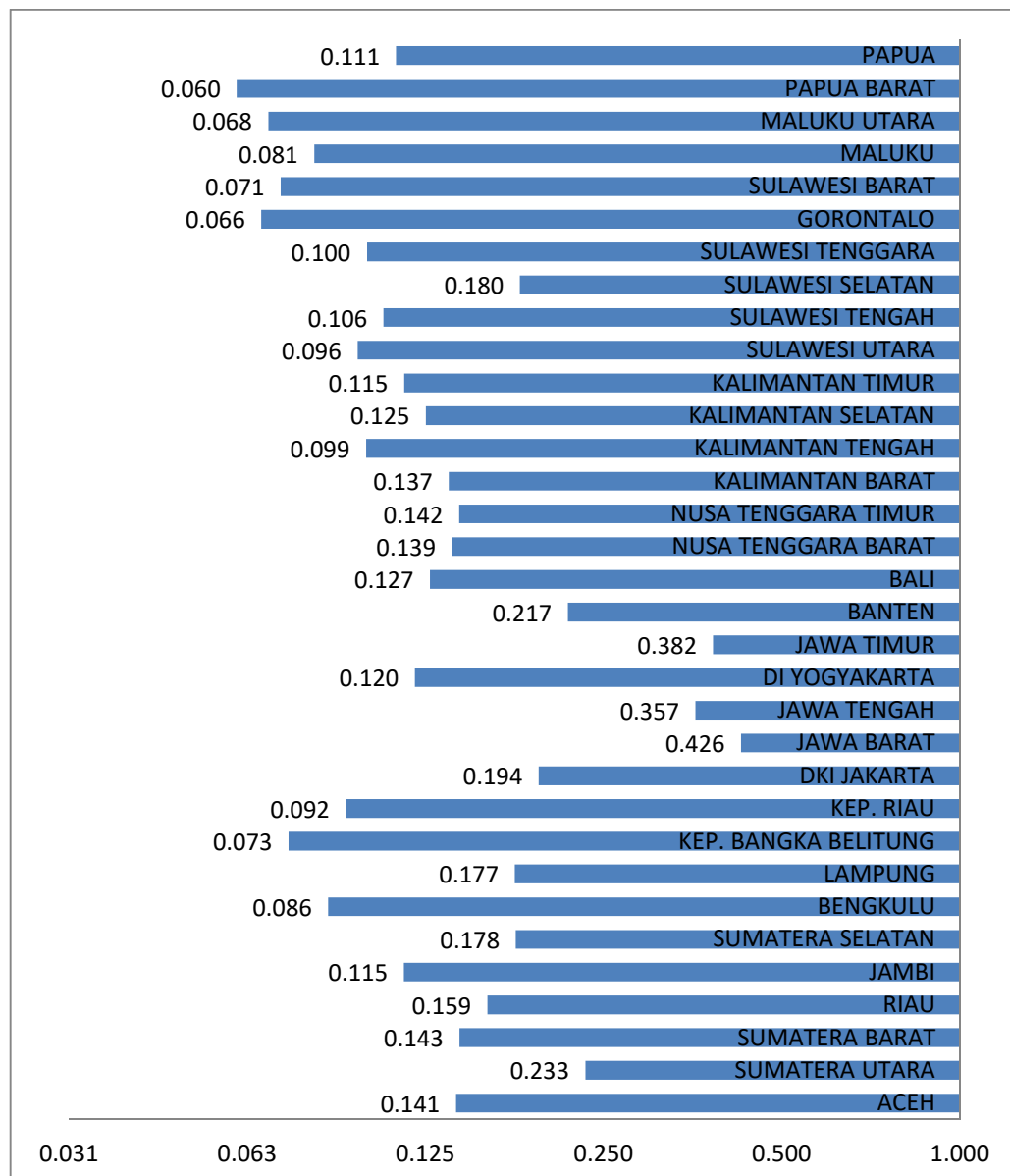
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020 (diolah)

Gambar 1.1 Rasio Gini Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1 Rasio Gini tahun 2020 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Rasio Gini provinsi di Indonesia masih cukup tinggi. Terlihat pada gambar tersebut bahwa provinsi di Indonesia memiliki Rasio Gini

rata-rata di atas 0,3. Menurut H.T Oshima dalam Makmur, Safrida, & Jayanthi (2011) kriteria klasifikasi penggunaan Rasio Gini ialah jika Rasio Gini lebih kecil dari 0,30 maka termasuk distribusi ketimpangan rendah. Jika Rasio Gini berkisar antara 0,31-0,40 maka termasuk kondisi ketimpangan sedang. Jika Rasio Gini lebih besar dari 0,40 maka termasuk pada kondisi ketimpangan tinggi.

Rasio Gini yang termasuk dalam kondisi ketimpangan rendah yaitu di bawah 0,30 ialah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rasio Gininya 0,262. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain memiliki Rasio Gni di atas 0,30 bahkan sampai ada yang di atas 0,40. Hal tersebut cenderung menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antar provinsi di Indonesia. Secara spasial, masing-masing daerah memiliki disparitas atau kondisi wilayah dan potensi yang berbeda-beda sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi dapat dikenakan di setiap wilayah yang berbeda agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang tercermin dari percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan Indeks Williamson yakni sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020 (diolah)

Gambar 1.2 Indeks Williamson Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.2 Indeks Williamson tahun 2020 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Williamson provinsi di Indonesia dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang rendah, karena terlihat pada gambar tersebut bahwa provinsi di Indonesia memiliki Indeks Williamson rata-rata di atas 0,1. Menurut Irmiyanti, Fauzi, & Kasimin (2017) kriteria klasifikasi penggunaan Indeks Williamson, jika analisis

menghasilkan nilai indeks dibawah 0,35 atau mendekati 0 berarti menunjukkan ketimpangan rendah, jika nilai Indeks Williamson antara 0,35 – 0,50 berarti tergolong ketimpangan sedang, dan jika nilai Indeks Williamson diatas 0,50 sampai dengan 1 berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar atau tinggi.

Indeks Williamson yang termasuk dalam kondisi ketimpangan yang cukup tinggi atau termasuk dalam kategori ketimpangan sedang yaitu dengan nilai indeks antara 0,35 sampai 0,50 ialah kawasan Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing indeks 0,426; 0,361; dan 0,388. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain memiliki Indeks Williamson di bawah 0,35. Namun, hal tersebut masih cenderung menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antar provinsi di Indonesia.

Perbedaan dari Rasio Gini dan Indeks Williamson ialah Rasio Gini merupakan alat untuk mengukur ketimpangan pada tingkat rumah tangga dan Indeks Williamson alat untuk mengukur ketimpangan antar wilayah. Penelitian ini menggunakan kedua alat ukur tersebut dengan tujuan untuk menguji variabel-variabel terpilih dalam penelitian untuk melihat pengaruh terhadap ketimpangan. Adanya perbedaan potensi sumber daya di masing-masing wilayah di Indonesia serta dengan mengetahui bahwa kondisi ketimpangan antar provinsi semakin timpang, maka dibutuhkan adanya kajian terkait dengan bagaimana kondisi ketimpangan berdasarkan provinsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan atau bahkan juga dapat menurunkan ketimpangan ialah globalisasi ekonomi (Munir, 2019).

Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam suatu sistem ekonomi global (Fakih dalam Agusalim, 2017). Salah satu bentuk globalisasi ekonomi ditandai dengan meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi ini akan menciptakan hubungan ekonomi yang saling memengaruhi antarnegara. Secara garis besar dalam ekonomi, globalisasi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi lintas negara dalam berbagai bentuk. Diantaranya yaitu dua bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal yaitu arus perdagangan dan arus modal internasional. Oleh karena itu, arus globalisasi dan arus perdagangan dunia berlangsung secara bersamaan (Zaroni, 2015).

Teori perdagangan dari Heckscher-Ohlin-Samuelson dan Teori Stolper-Samuelson memprediksikan bahwa globalisasi ekonomi akan mempersempit disparitas pendapatan di negara berkembang (Stolper dan Samuelson dalam Heimberger, 2019). Keterbukaan perdagangan akan menguntungkan faktor produksi suatu negara yang relatif melimpah, karena biasanya spesialisasi perdagangan lebih mengutamakan sektor yang intensif pada faktor yang melimpah. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, negara berkembang biasanya memiliki keunggulan komparatif dalam faktor tenaga kerja tidak terampil.

Perdagangan internasional akan meningkatkan permintaan pekerja tidak terampil di negara berkembang yang dapat menaikkan upah riil mereka sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Berbeda dengan

prediksi pada negara maju, karena keterbukaan perdagangan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan riil untuk tenaga kerja terampil. Banyak ekonom menekankan bahwa berlawanan dengan pandangan neoklasik jika liberalisasi mengurangi ketimpangan, globalisasi justru memperburuk ketimpangan di negara berkembang (Dorn & Fuest, 2017).

Namun, hasil penelitian dari Munir (2019) mengatakan bahwa globalisasi perdagangan secara signifikan berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Dampak globalisasi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa integrasi keuangan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Kemudian dalam penelitian Heimberger (2019) globalisasi berdampak positif terhadap ketimpangan pendapatan. Heimberger juga berargumentasi meskipun pengaruh globalisasi perdagangan kecil, akan tetapi globalisasi keuangan menunjukkan dampak peningkatan ketimpangan yang lebih besar dan signifikan. Globalisasi dalam penelitian ini diproses sebagai perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan *Foreign Direct Investment* (FDI).

Selain itu perkembangan keuangan juga berpengaruh terhadap ketimpangan. Sesuai dengan (Barajas et al., 2015) dan (Naceur & Zhang, 2016), mengungkapkan bahwa peningkatan akses keuangan menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, menurut (Kumhof & Rancière, 2010), finansialisasi yang lebih tinggi menurunkan stabilitas keuangan dan akibatnya meningkatkan ketimpangan.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dengan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan yang inklusif, pada tahun 2012 pemerintah Indonesia mengeluarkan *National Financial Inclusion Strategy* (NFIS) dengan menempatkan sektor keuangan sebagai jangkar bagi pertumbuhan ekonomi (Aginta, Soraya, & Santoso, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang *Nation Financial Inclusion Strategy* mendukung pengembangan keuangan inklusif di Indonesia. Tujuan dari peraturan tersebut ialah untuk memberikan akses ke lembaga jasa keuangan terhadap 75 persen penduduk di Indonesia di akhir tahun 2019 (Aginta et al., 2018). Menurut (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2017) yang dirilis oleh *World Bank* pada April 2018, inklusi keuangan Indonesia telah membuat kemajuan paling pesat di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan tersebut menyebutkan bahwa penduduk yang memiliki rekening bank di Indonesia yaitu 49 persen pada tahun 2017, jauh lebih tinggi dari 20 persen dan 36 persen yang masing-masing pada tahun 2011 dan 2014. Perkembangan keuangan dalam penelitian ini diproksikan sebagai inklusi keuangan.

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Lee (2019); Aginta et al., (2018); Zia & Prasetyo (2018). Pertama, studi dari Lee (2019) meneliti mengenai dampak perkembangan keuangan, urbanisasi, dan globalisasi terhadap ketimpangan di Cina. Kedua, Aginta et al., (2018) juga meneliti mengenai perkembangan keuangan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Ketiga, Zia & Prasetyo (2018) meneliti mengenai hubungan dan pengaruh keuangan inklusif terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Secara komprehensif beberapa penelitian tersebut belum membahas secara bersamaan mengenai dampak globalisasi dan perkembangan keuangan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan globalisasi dan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Sehingga, pada studi ini akan mengestimasi dampak dari globalisasi dan perkembangan keuangan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia melalui regresi data panel. Maka diharapkan tahap akhir penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu: Apakah globalisasi yang diukur melalui perdagangan internasional dan *foreign direct investment* serta perkembangan keuangan yang diukur melalui inklusi keuangan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan baik ketimpangan pendapatan rumah tangga maupun antar wilayah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak globalisasi yang diukur melalui perdagangan internasional dan *foreign direct investment* serta perkembangan keuangan yang diukur melalui inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan baik ketimpangan rumah tangga maupun antar wilayah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian diharapkan mampu atau bisa menjadi bahan perkembangan keilmuan, khususnya pada bidang ilmu ekonomi.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi acuan pertimbangan terhadap pembuat kebijakan pemerataan pendapatan/ ekonomi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menganalisis dampak dan pengaruh dari globalisasi dan perkembangan keuangan di provinsi Indonesia selama kurun waktu 2011-2020 yang merupakan periode tahunan.